

**PENTINGNYA FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH  
MENYANGKUT PEMBAGIAN DANA PEMBERDAYAAN KAMPUNG di DISTRIK ANGKAESERA KAMPUNG  
MENAWI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**

**Oleh : HERMAN BONAI**

**ABSTRACT**

*Tidak dapat disangkal bahwa penguatan peran lembaga legislatif di era reformasi ini adalah suatu keharusan yang tidak dapat dibantahkan lagi. Seperti diketahui fungsi dan peran DPRD adalah melaksanakan fungsi-fungsi, budgeting, legislation, dan controlling sudah merupakan kebutuhan internal bagaimana DPRD dapat menciptakan suatu mekanisme kerja yang dapat mengoptimalkan kinerjanya. Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga perwakilan tempat masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan menyuarakan kepentingannya, lewat lembaga ini akan keluar kebijakan yang menjadi dasar bagi eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan, yang diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah. Sebagai ganti dari demokrasi langsung maka lahirlah demokrasi perwakilan, yang diwujudkan dengan adanya pembentukan lembaga tempat untuk menyuarakan berbagai kepentingan dan kehendak masyarakat. Secara umum lembaga ini dikenal dengan nama "parlemen". Dengan demikian dalam penelitian skripsi ini akan dititik beratkan pada kajian tentang salah satu fungsi pokok DPR yaitu fungsi pengawasan, bahwa fungsi pengawasan terutama fungsi pengawasan DPRD terhadap kebijakan pemerintah daerah. Pengawasan DPRD terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam hal ini menyangkut pembagian dana pemberdayaan kampung di distrik angkaesera kampung Menawi Kabupaten Yapen. Dari gambaran ini akan di peroleh gambaran sejauh mana DPRD Kabupaten telah menjalankan fungsinya kontrolnya atau pengawasannya.*

**Kata Kunci : Fungsi Pengawasan, Kebijakan, Pemerintah Daerah, Pemberdayaan**

**PENDAHULUAN**

Tidak dapat disangkal bahwa penguatan peran lembaga legislatif di era reformasi ini adalah suatu keharusan yang tidak dapat dibantahkan lagi. Seperti diketahui fungsi dan peran DPRD adalah melaksanakan fungsi-fungsi, budgeting, legislation, dan controlling sudah merupakan kebutuhan internal bagaimana DPRD dapat menciptakan suatu mekanisme kerja yang dapat mengoptimalkan kinerjanya. Menumbuhkan kesadaran DPRD akan fungsi yang diembannya merupakan suatu kebutuhan yang mendesak. Karena masyarakat madani sangat berharap banyak agar DPRD dapat melakukan fungsi-fungsi parlemennya dengan peran yang lebih nyata dan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. . Sebagai ganti dari demokrasi langsung maka lahirlah demokrasi perwakilan, yang diwujudkan dengan adanya pembentukan lembaga tempat untuk menyuarakan berbagai kepentingan dan kehendak masyarakat. Secara umum lembaga ini dikenal dengan nama "parlemen". Dengan demikian dalam penelitian skripsi ini akan dititik beratkan pada kajian tentang salah satu fungsi pokok DPR yaitu fungsi pengawasan, bahwa fungsi pengawasan terutama fungsi pengawasan DPRD terhadap kebijakan pemerintah daerah. Pengawasan DPRD terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam hal ini menyangkut pembagian dana pemberdayaan kampung di distrik angkaesera kampung Menawi

Kabupaten Yapen. Dari gambaran ini akan di peroleh gambaran sejauh mana DPRD Kabupaten telah menjalankan fungsinya kontrolnya atau pengawasannya.

Berdasarkan latar belakang diatas maka menarik untuk dielaborasi lebih lanjut adalah pengawasan menjadi hal penting dalam menyukseskan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah tersebut, namun dalam kebanyakan persoalan, pengawasan terkadang kurang maksimal sehingga mempengaruhi pencapaian kebijakan pemerintah daerah tersebut. Atas dasar ini penelitian mengangkat permasalahan :

Bagaimana pengawasan DPRD terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam hal ini menyangkut pembagian dana pemberdayaan kampung di distrik Angkaisera kampung Menawi Kabupaten Kepulauan Yapen?

Penelitian ini bertujuan menjelaskan pentingnya pengawasan DPRD terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam hal ini menyangkut pembagian dana pemberdayaan kampung di distrik Angkaisera kampung Menawi Kabupaten Kepulauan Yapen

Metode yang pakai dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Masri Singarimbun (1982), bertujuan untuk mendeskripsikan secara terperinci tentang fenomena sosial tertentu. Dalam penelitian ini, menurut Bungin (2004), penulis tidak melakukan kuantifikasi terhadap data yang diperoleh. Data yang diperoleh akan dianalisis serta dideskripsikan berdasarkan penemuan fakta-fakta penelitian di lapangan. Pendekatan inilah yang akan dipergunakan dalam menjelaskan fenomena dan menganalisis peranan, kendala, solusi, dan strategi pengembangan pentingnya fungsi pengawasan DPRD dalam kebijakan pemerintah daerah.

Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, informan dalam penelitian ini adalah: Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen (Komisi II Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan), Camat, Kepala Kampung, serta beberapa tokoh masyarakat.

Penelitian ini melibatkan beberapa informan dari berbagai unsur, yaitu: Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen, Kepala Distrik, Kepala Kampung Menawi, dan beberapa tokoh masyarakat.

Perlu diketahui bahwa tingkat pendidikan informan dalam penelitian ini berbeda-beda, dari informan yang dicantumkan diatas (selain Masyarakat) semuanya telah lulus jenjang pendidikan dasar (SD, SMP, SMA), walaupun ada dari beberapa informan yang mengikuti pendidikan dasar ini tidak seutuhnya, dalam artian ada beberapa informan yang langsung loncat kelas, dan ikut penyesuaian paket B dan paket C.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil yang akan disajikan adalah analisis Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen dalam mengontrol kebijakan pemerintah daerah dalam pembagian dana pemberdayaan masyarakat, khususnya dikampung Menawi Distrik Angkaisera. Data yang diperoleh berdasarkan wawancara dengan informan, informan kunci, dan informan pelengkap. Hasil penelitian ini akan meliputi: karakteristik informan, pengamatan masyarakat terhadap Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen.

Berbicara fungsi pengawasan legislatif berarti tidak terlepas dari hak-hak daripada legislatif itu sendiri. Fungsi kontrol legislatif akan terlihat sejauhmana hak-hak digunakan dalam mengontrol kinerja eksekutif.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen telah cukup melaksanakan fungsi pengawasannya dengan baik. Ini dapat dilihat dengan beberapa program yang telah dilaksanakan selain mengadakan kunjungan ke daerah-daerah (Kampung se-kabupaten), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen telah menghasilkan beberapa produk dan kerjasama yang baik dengan

eksekutif. Pada tahun 2011 DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen berhasil membentuk tim peningkatan kesejahteraan masyarakat petani, dan masih ada yang lainnya seperti keberpihakan kepada rakyat lewat pengalokasian dana APBD. Jadi singkatnya setiap kebijakan dan pelaksanaan dari kebijakan tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen telah menggunakan kontrolnya dengan cukup bila dibandingkan pada masa pemerintahan orde baru.

Gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh DPRD di era otonom, sangat jauh bedanya dengan era orde baru. Dimana kontrol ialah bersifat tidak sepihak dan responsibilitas yang baik. Contoh kasus perbandingannya adalah penyaluran dana pemberdayaan masyarakat. Berbagai tindakan dan tekanan yang dilakukan oleh DPRD bahkan kunjungan langsung ke daerah-daerah konflik yang pada akhirnya konflik dapat tertanggulangi dan keinginan untuk “merdeka” atau bebas dari ancaman dari warga yang lain telah membuahkan hasil.

Tindakan ini sesungguhnya merupakan wujud peran dan kontrol yang sedikitnya telah berubah dari sebelumnya. Dengan tingkat kesadaran Dewan yang cukup tersebut pada akhirnya masyarakat telah diperdayakan secara seimbang tanpa melihat golongan-golongan tertentu. Inilah yang merupakan hasil kinerja dari DPRD, Walaupun demikian kita tidak harus beranggapan bahwa fungsi kontrol legislatif telah berhasil secara maksimal, tetapi tentunya masih ada kepentingan-kepentingan kemasyarakatan yang belum terpenuhi secara utuh. Sehingga ini dimaklumi dengan rasional, sebab tidak harus semua kebutuhan akan terpenuhi secara maksimal.

Selanjutnya dari semua program kerja jangka pendek yang telah dilaksanakan oleh Kepala Daerah telah memperoleh respon yang positif dari DPRD. Kemungkinan besar, dikarenakan kontrol legislatif yang cukup sehingga pada laporan tahunan bupati diterima dengan penuh tetapi pada kemungkinan yang lain, disebabkan oleh kompromi politik antara kedua lembaga tersebut. Salah satu contoh adalah laporan pertanggungjawaban bupati pada April 2012 yang lalu. Laporan Bupati diterima dalam jangka waktu yang singkat oleh legislatif. Dari hasil pemantauan menunjukkan bahwa diterimanya laporan dengan waktu singkat tersebut diakibatkan kontrol yang telah dilakukan sebelum laporan tersebut dipertanggungjawabkan. Dari beberapa informan yang diwakili oleh setiap Ketua Fraksi dan Ketua Dewan dan juga wakilnya serta sebagian anggotanya, megatakan bahwa laporan yang diterima tersebut telah sesuai dengan apa yang direncanakan dan pada dasarnya sebelum dilaporkan, Dewan telah meninjau bahan laporan tersebut. Jawaban inilah yang telah diberikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada peneliti.

Dari jawaban informan tersebut, penulis memiliki 2 (dua) asumsi terhadap tingkat kesuksesan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam mengontrol eksekutif. Pertama, kemungkinan tersebut tingkat kesuksesan telah cukup dengan pertimbangan laporan diterima dalam waktu singkat dan kemudian tingkap presuare dari kelompok-kelompok tertentu sangat minim, bahkan tidak ada yang menolak laporan dari eksekutif. Bila di daerah Kabupaten Kepulauan Yapen tingkat partisipasi politik masyarakat telah tinggi, maka dengan keberadaan laporan pertanggungjawaban yang kemudian masyarakat tidak mempersoalkannya berarti keinginan dan laporan tersebut telah baik.

Sedangkan asumsi kedua, adalah kepentingan yang telah mendominasi kontrol legislatif sehingga politik balas budi ikut mewarnai sidang tersebut. Akibatnya apapun hasil laporan pertanggungjawaban harus diterima oleh kalangan legislatif. Asumsi ini dianalisis dengan jawaban informan yang telah diharmonisasikan oleh Ketua Legislatif. Sehingga laporan informan menjadi satu jawaban yang sama dengan pertimbangan bahwa kontrol legislatif terhadap eksekutif telah efektif.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi kontrol legislatif telah mengalami kemajuan. Namun demikian tingkat kesuksesan belum sepenuhnya efisien. Hal ini dikarenakan tingkat kebutuhan masyarakat belum terpenuhi sesuai dengan tuntutan rakyat. Dan ini sangatlah manusiawi karena rasa ketidakpuasan merupakan kodrat manusia.

## **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Kontrol DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen**

Kita dapat melihat bahwa berperannya DPRD sangat terkait dengan faktor-faktor yang sifatnya menghambat pelaksanaan daripada fungsi kontrol DPRD itu sendiri. Faktor-faktor tersebut antara lain :

### **a. Faktor Internal.**

- Hambatan budaya, yang menyebabkan perasaan risih pada anggota DPRD dalam mengungkapkan suatu kebenaran dalam permasalahan-permasalahan yang diangkat. Rasa kebersamaan masih kental mempengaruhi suasana hati para anggota DPRD. Sehingga ketika ada input-input yang masuk terutama menyangkut permasalahan dengan pejabat tertentu, DPRD kurang mampu mengembangkan suatu dialog yang tajam dan kritis, dengan alasan tidak enak dapat menyinggung perasaan hati si pejabat. Padahal seharusnya sebagai anggota Dewan yang berfungsi mewakili rakyat, sudah selayaknya mereka ingin menyingkirkan perasaan-perasaan tidak enak tersebut, apalagi jika persoalan-persoalan yang melibatkan pejabat diinstansi tertentu jelas-jelas merugikan masyarakat banyak.
- Masalah keterbukaan anggota DPRD dalam menyampaikan informasi yang benar dalam suatu pembahasan menyangkut persoalan-persoalan yang muncul ditengah-tengah masyarakat dalam rangka menyalurkan aspirasi rakyat. Keterbukaan memang relatif sifatnya, akan tetapi dalam konotasi dan konteks penyaluran aspirasi rakyat, diharapkan semua informasi yang diperoleh melalui komunikasi politik yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, haruslah diungkapkan secara jelas sesuai dengan keadaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat melalui masing-masing anggota DPRD dari berbagai partai, fraksi dan komisi.

### **b. Faktor Eksternal**

- Adanya dominasi eksekutif. Ini terlihat dalam laporan pertanggungjawaban Bupati April 2012 yang lalu, yang dilaksanakan dalam waktu yang singkat dan langsung diterima oleh pihak legislatif. Sehingga memungkinkan adanya suatu politik balas budi yang mewarnai bidang tersebut. Akibatnya apapun hasil laporan tersebut harus diterima oleh kalangan legislatif daerah.
- Budaya yang masih bercirikan feodalisme, yang mengakibatkan sesuatu pendapat hanya dinilai dari siapa yang mengungkapkannya dan bukan melihat dari apa isi ungkapan tersebut. Padahal jika kita melihat lebih jauh setengah dari anggota DPRD rata-rata sarat dengan pengalaman baik di bidang pemerintahan maupun legislatif karena ada yang beberapa sebenarnya tidak ada alasan bagi mereka untuk menjunjung budaya feodalis

## **PENUTUP**

### **a. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dalam bab sebelumnya, maka penelitian tentang pentingnya fungsi pengawasan DPRD terhadap kebijakan pemerintah menyangkut pembagian dana pemberdayaan masyarakat kampung didistrik angkaisera kampung menawi kabupaten yapen adalah sebagai berikut:

1. DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen telah melaksanakan fungsinya dalam hal pengawasan pembagian dana pemberdayaan masyarakat, walaupun tidak keseluruhan kampung-kampung yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen tidak dikunjungi, tetapi secara umum penyaluran dana pemberdayaan masyarakat telah diagendakan oleh DPRD untuk dilakukan pengawasan, hal ini terbukti dengan pengawasan DPRD pada tahun anggaran 2012 yang lalu.
2. Penggunaan dana pemberdayaan masyarakat secara umum telah digunakan sesuai dengan prosedur dan peruntukannya, hasil temuan dan evaluasi DPRD mengungkapkan bahwa tingkat angka kemiskinan warga yang ada di kabupaten kepulauan yapen dapat ditekan, walaupun

diakui bukan hanya melalui pembagian dana pemberdayaan ini, tetapi ada pula gebrakan lainnya yang dilakukan oleh DPRD, seperti membentuk tim peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan.

3. Pengawasan langsung DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen belum maksimal dan belum dapat menjangkau ke semua kampung yang ada, karena prasarana dan sarana transportasi yang masih belum layak dan memadai.
4. Perlunya pengawasan secara universal oleh DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen untuk dapat mengunjungi semua kampung yang ada di wilayah kabupaten, dan perlunya DPRD mengagendakan kunjungan ini, untuk dapat melihat secara langsung pembagian dana pemberdayaan, khususnya yang ada di kampung menawi.
5. Perlunya peningkatan jumlah dana pemberdayaan masyarakat lewat perjuangan DPRD dalam membahas APBD melalui pos anggaran bantuan kepada masyarakat, ditahun anggaran berikutnya, untuk lebih memperkecil angka kemiskinan yang ada di kabupaten kepulauan yapen
6. Pihak eksekutif bersama-sama dengan legislative diharapkan untuk lebih memperhatikan sarana dan prasarana transportasi yang ada di kabupaten kepulauan yapen, untuk dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi Adib, Ahung Hendarto, Nizar Suhendar, (2002), *Good governance dan Penguatan Institusi Daerah, Masyarakat Transparansi Indonesia*, Jakarta.
- Andriani, (2002), *Pengaruh Pengetahuan RPPs terhadap peranan DPRD dalam Pengawasan Anggaran (Studi Kasus pada DPRD se-Propinsi Bengkulu, Tesis Program Pasca Sarjana UGM, Jogjakarta.*
- Andrianto Rinto, (2002), *Memahami Anggaran Publik, Cetakan Pertama, Idea Press, Jogjakarta.*
- Budiardjo Miriam, Ibrahim Ambong (1993) *Fungsi legislatif dalam sistem politik Indonesia* Penerbit Raja Grafindo Persada Jakarta
- Estingsih, Muji, (2005) *Fungsi Pengawasan DPRD (Tinjauan kritis Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa)* Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta .
- Ichsan M, Ratih dan Trilaksono, N, (1997), *Administrasi keuangan Daerah: Pengelolaan dan penyusunan APBD, Malang, Brawijaya University*
- Mardiasmo, (2002), *Pengawasan, Pengendalian, dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Andi, Jogjakarta.*
- Mikkelsen, Britha. (1999). *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Rahman Andi, Muh Azis (2006) *Model Penilaian Kinerja Wakil Rakyat: Panduan untuk Menilai Kinerja Anggota DPR/DPRD*, Penerbit, DIA FISIP UI
- Yudono Bambang, (2002), *Optimalisasi Peran DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, <http://www.bangda.depdagri.go.id/jurnal/jendela/jendela.3.htm>.
- Zainuddin Karim, Abdul Gaffar (2002) *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia.* Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi, 1986, *Metode Penelitian Survey*, Suntingan LP3ES, Jakarta.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta.
- Kunarjo, 2002, *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*, Universitas Indonesia UI Press, Jakarta.
- Kartasasmita, Ginanjar, 1997, *Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta.

Moleong, Lexy, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosada Karya, Bandung.  
PriyonoWahyu, 2009. *Optimalisasi Fungsi Dprd Dalam Pengawasan Pemerintah Daerah*. Karya Tulis

Bahan Bacaan :

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah  
(2001), Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah  
Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah  
Undang-Undang No. 33 tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah  
Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan  
Negara  
Undang-Undang No. 17 tahun 2004 tentang Keuangan Negara  
Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah.  
Keputusan Presiden no. 74 tahun 2002 Departemen dalam Negeri, Konsep dan Paduan Perencanaan  
Anggaran Daerah, Direktorat Jendral Otonomi Daerah